



Strategi Akselerasi Penanganan Rumah Tidak Layak Huni melalui Transformasi Intervensi Berbasis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) di Kabupaten Sikka

Maria Ernestin Sodin¹,

Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sikka

Jln.Mawar No.24, Kelurahan Madawat, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, Provinsi NTT

Email : mariaernestin81@gmail.com

Abstract.

The management of Uninhabitable Houses (Rumah Tidak Layak Huni/RTLH) in Sikka Regency faces a critical challenge due to the high number of inadequate housing units distributed across both urban and rural areas with complex geographical characteristics. The primary obstacle to effective policy implementation stems from the limited capacity of local government interventions in improving housing quality on a sustainable basis, which is largely caused by poor-quality housing data and the absence of an integrated single-data information system. This policy paper aims to formulate an acceleration strategy for addressing RTLH through the reform of data governance that is accurate, efficient, and accountable.

Using Eugene Bardach's (2012) policy analysis framework to evaluate alternative solutions based on technical feasibility, economic viability, political acceptability, and administrative operability, this study identifies the transformation of intervention mechanisms based on the National Integrated Socio-Economic Data (Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional/DTSEN) as the most appropriate policy option. To ensure long-term sustainability, the paper recommends a Phased Convergence Strategy, whereby data cleansing and matching processes based on DTSEN are implemented at the upstream level and subsequently integrated into the "One Data RTLH Sikka" digital platform in the medium term.

This operational strategy is further strengthened through the enactment of a Regent Regulation (Peraturan Bupati) on Data Governance and the Mechanism for Determining Eligible Beneficiaries of Decent Housing Assistance, providing a legally binding framework for policy implementation. By positioning village and urban ward governments as the frontline actors in conducting by-name-by-address (BNBA) field verification, the policy minimizes the risks of inclusion and exclusion errors, eliminates budget overlaps, and optimizes local innovative programs such as the TERKASIH House Assistance Scheme (Terima Kunci Siap Huni – "Receiving the Key to a Ready-to-Occupy House"). The implementation of these recommendations is expected to promote data-driven governance that accelerates the reduction of extreme poverty and enhances the effectiveness of housing assistance programs in Sikka Regency.

Keywords: Uninhabitable Houses (RTLH), DTSEN, Data Governance, Data-Driven Governance, Housing Policy, Extreme Poverty Reduction, Sikka Regency.

Abstrak.

Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kabupaten Sikka menghadapi tantangan krusial berupa tingginya angka hunian tidak layak yang tersebar di wilayah perkotaan maupun perdesaan dengan karakteristik geografis yang kompleks. Hambatan utama kebijakan ini bersumber dari rendahnya intervensi pemerintah daerah dalam peningkatan kualitas RTLH secara berkelanjutan akibat rendahnya kualitas data hunian dan ketiadaan sistem informasi satu data yang terpadu. Makalah kebijakan ini bertujuan merumuskan strategi akselerasi penanganan RTLH melalui reformasi tata kelola data yang akurat, efisien, dan akuntabel. Dengan menggunakan metode Eugene Bardach (2012) untuk menguji alternatif solusi berdasarkan kriteria kelayakan teknis, ekonomi, politik dan operasional, studi ini menetapkan pilihan terbaik berupa transformasi mekanisme intervensi berbasis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Untuk menjamin keberlanjutan jangka panjang, dokumen ini merekomendasikan Strategi Konvergensi Bertahap

(Phased Convergence Strategy), di mana pembersihan (cleansing) dan penyandingan (matching) data berbasis DTSEN di lini hulu diintegrasikan ke dalam platform digital "Satu Data RTLH Sikka" pada jangka menengah. Strategi operasional ini diperkuat secara hukum melalui pengundangan Peraturan Bupati Sikka tentang Tata Kelola Data dan Mekanisme Penetapan Sasaran Penerima Bantuan Perumahan Layak Huni yang mengikat secara operasional (legally binding). Dengan menempatkan Pemerintah Desa dan Kelurahan sebagai ujung tombak verifikasi data lapangan by name by address (BNBA), kebijakan ini meminimalkan risiko inclusion dan exclusion error, mengeliminasi tumpang tindih anggaran, serta mengoptimalkan program inovatif lokal seperti skema bantuan Rumah TERKASIH ('Terima Kunci Siap Huni'). Implementasi rekomendasi ini diharapkan mampu mewujudkan tata kelola pemerintahan berbasis data (data-driven governance) yang akseleratif dalam mengentas kemiskinan ekstrem di Kabupaten Sikka.

Kata kunci: RTLH, DTSEN, Strategi Konvergensi Bertahap, Peraturan Bupati Sikka, Data-Driven Governance

1. LATAR BELAKANG

Pemenuhan kebutuhan atas tempat tinggal yang layak, aman, dan terjangkau merupakan salah satu hak dasar warga negara yang dijamin dalam Pasal 28H Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hak atas perumahan yang layak tidak hanya berkaitan dengan penyediaan sarana fisik berupa bangunan rumah, tetapi juga mencerminkan upaya negara dalam menjamin kesejahteraan masyarakat, kesehatan lingkungan, serta kualitas hidup yang berkelanjutan. Dalam kerangka pembangunan nasional, sektor perumahan memiliki peran strategis sebagai salah satu instrumen utama dalam penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ketersediaan hunian yang layak diyakini mampu meningkatkan kualitas kesehatan, produktivitas ekonomi, dan stabilitas sosial masyarakat secara berkelanjutan.

Dalam konteks pembangunan daerah, Kabupaten Sikka saat ini menghadapi tantangan yang cukup serius pada sektor perumahan, khususnya tingginya jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang tersebar di berbagai wilayah. Permasalahan ini tidak hanya ditemukan pada kawasan permukiman kumuh di wilayah perkotaan, tetapi juga menjangkau wilayah perdesaan terpencil yang memiliki karakteristik geografis kompleks, keterbatasan akses transportasi, serta minimnya infrastruktur dasar. Sebaran RTLH yang luas dan beragam tersebut menyebabkan upaya intervensi pemerintah menjadi semakin sulit dilakukan secara efektif dan tepat sasaran.

Permasalahan RTLH tidak dapat dipandang semata-mata sebagai persoalan fisik bangunan. Secara empiris, kondisi rumah yang tidak layak huni memiliki keterkaitan erat dengan berbagai persoalan sosial dan kesehatan masyarakat. Keterbatasan akses terhadap sanitasi yang layak, air bersih, ventilasi yang memadai, dan kondisi struktur bangunan yang aman berpotensi meningkatkan risiko berbagai penyakit menular, gangguan kesehatan lingkungan, hingga stunting

pada anak. Selain itu, kondisi hunian yang buruk juga berdampak pada rendahnya produktivitas ekonomi rumah tangga karena rumah tidak mampu berfungsi secara optimal sebagai ruang hidup yang sehat dan produktif. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut berpotensi memperkuat siklus kemiskinan antargenerasi yang sulit diputus.

Meskipun berbagai program bantuan perumahan telah dilaksanakan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, capaian peningkatan kualitas RTLH di Kabupaten Sikka masih belum menunjukkan hasil yang optimal. Berdasarkan dokumen perencanaan daerah, terdapat sejumlah hambatan yang menyebabkan rendahnya efektivitas intervensi pemerintah, antara lain belum terintegrasinya koordinasi lintas sektor, minimnya pengetahuan masyarakat mengenai standar rumah layak huni, serta rendahnya kualitas data perumahan yang digunakan sebagai dasar perencanaan dan penetapan sasaran program. Kondisi tersebut mengakibatkan proses perencanaan dan pelaksanaan program bantuan perumahan sering menghadapi permasalahan ketidaktepatan sasaran, tumpang tindih program, serta keterbatasan dalam melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkelanjutan.

Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa akar permasalahan utama terletak pada belum tersedianya sistem informasi satu data perumahan yang terintegrasi. Ketiadaan sistem informasi yang terpadu menyebabkan data RTLH yang dimiliki oleh berbagai perangkat daerah sering kali berbeda, tidak mutakhir, dan sulit digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Selain itu, proses verifikasi dan validasi data masih dilakukan secara parsial dengan metodologi yang belum terstandarisasi sehingga meningkatkan risiko terjadinya inclusion error maupun exclusion error dalam penetapan sasaran penerima bantuan. Akibatnya, pemerintah daerah mengalami kesulitan dalam menyusun kebijakan yang tepat, efektif, dan berkelanjutan untuk menangani permasalahan RTLH.

Sejalan dengan kebijakan nasional mengenai transformasi tata kelola data melalui pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), diperlukan suatu pendekatan baru yang mampu memperkuat akurasi data, meningkatkan koordinasi lintas sektor, dan mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti (*evidence-based policy*). Integrasi data RTLH dengan DTSEN dipandang sebagai langkah strategis untuk menghasilkan basis data yang lebih akurat, mutakhir, dan terintegrasi sehingga mampu meningkatkan efektivitas program penanganan kemiskinan berbasis perumahan.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian kebijakan ini bertujuan untuk menganalisis alternatif kebijakan yang paling efektif dalam mempercepat penanganan Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Sikka. Melalui pendekatan analisis kebijakan Eugene Bardach, penelitian ini berupaya merumuskan strategi yang mampu memperkuat tata kelola data perumahan, meningkatkan akurasi sasaran penerima bantuan, serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan berbasis data (data-driven governance) dalam upaya percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Sikka.

2. KAJIAN TEORITIS

Data-Driven Governance dalam Tata Kelola Perumahan

Perkembangan paradigma administrasi publik modern menunjukkan pergeseran dari model pemerintahan berbasis prosedur menuju pemerintahan berbasis data (data-driven governance). Konsep ini menekankan penggunaan data yang akurat, terintegrasi, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar pengambilan keputusan publik, penyusunan kebijakan, serta evaluasi kinerja pemerintahan. Menurut Janssen, Charalabidis, dan Zuiderwijk (2012), tata kelola berbasis data memungkinkan pemerintah meningkatkan efektivitas pelayanan publik melalui pemanfaatan informasi yang terintegrasi dan berbasis bukti (evidence-based policy).

Dalam konteks pembangunan perumahan, pendekatan data-driven governance menjadi sangat penting karena keberhasilan program bantuan perumahan sangat bergantung pada ketepatan identifikasi sasaran penerima manfaat. Ketersediaan data yang valid akan meminimalkan risiko kesalahan sasaran (inclusion error dan exclusion error), meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran, serta memperkuat akuntabilitas pemerintah daerah. Oleh karena itu, reformasi tata kelola data menjadi prasyarat utama dalam percepatan penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kabupaten Sikka.

Konsep Satu Data Indonesia dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Implementasi tata kelola pemerintahan berbasis data di Indonesia didukung oleh kebijakan nasional melalui Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (SDI). Kebijakan ini bertujuan mewujudkan data pemerintah yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan. Prinsip utama SDI meliputi standar data, metadata, interoperabilitas data, dan penggunaan kode referensi yang sama antarinstansi pemerintah.

Di sisi lain, Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menjadi kerangka transformasi digital pemerintahan yang mendorong integrasi proses bisnis, layanan publik, serta sistem informasi pemerintahan. Dalam perspektif kebijakan publik, SDI dan SPBE merupakan dua instrumen yang saling melengkapi. SDI berfungsi menjamin kualitas dan integritas data, sedangkan SPBE menyediakan infrastruktur digital yang memungkinkan pertukaran dan pemanfaatan data secara lintas sektor. Sinergi keduanya menjadi fondasi penting dalam pembangunan sistem informasi perumahan yang terintegrasi dan berkelanjutan.

Penanganan Rumah Tidak Layak Huni sebagai Instrumen Pengentasan Kemiskinan

Rumah merupakan kebutuhan dasar manusia yang memiliki hubungan erat dengan tingkat kesejahteraan sosial dan kualitas hidup masyarakat. Menurut Turner (1976), perumahan tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal, tetapi juga sebagai sarana peningkatan produktivitas ekonomi, kesehatan, dan keamanan sosial keluarga. Oleh karena itu, kualitas hunian menjadi salah satu indikator penting dalam pengukuran kemiskinan multidimensi.

Dalam konteks kebijakan nasional, penanganan RTLH merupakan bagian dari strategi pengurangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7 Tahun 2022 menetapkan bahwa rumah layak huni harus memenuhi aspek keselamatan bangunan, kecukupan ruang, serta akses terhadap sanitasi dan air minum yang layak. Standar tersebut menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam merancang program bantuan perumahan yang tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga pada peningkatan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh.

Integrasi Data Sosial Ekonomi Nasional dalam Penargetan Program

Ketepatan sasaran merupakan faktor penentu keberhasilan program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan. Kesalahan dalam penetapan penerima manfaat dapat menyebabkan pemborosan anggaran serta menurunkan efektivitas kebijakan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah mengembangkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai basis data terpadu yang digunakan dalam berbagai program perlindungan sosial dan pengentasan kemiskinan.

Keberadaan DTSEN memberikan peluang bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas perencanaan program perumahan melalui mekanisme cleansing dan matching data

penerima bantuan. Dengan memanfaatkan basis data nasional yang telah diverifikasi secara berjenjang, pemerintah daerah dapat mengurangi potensi tumpang tindih program sekaligus memastikan bahwa bantuan RTLH diberikan kepada kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Integrasi DTSEN dengan data sektoral perumahan juga mendukung implementasi kebijakan yang lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran.

Analisis Kebijakan Eugene Bardach

Kerangka kerangka analisis kebijakan yang dikembangkan oleh Eugene Bardach (2012) melalui pendekatan Eightfold Path of Policy Analysis. Pendekatan ini menekankan pentingnya identifikasi masalah, penyusunan alternatif kebijakan, evaluasi alternatif, serta pemilihan solusi yang paling rasional berdasarkan sejumlah kriteria tertentu.

Evaluasi alternatif kebijakan dilakukan menggunakan empat kriteria utama, yaitu technical feasibility (kelayakan teknis), economic and financial possibility (kemungkinan ekonomi dan keuangan), political viability (keberlangsungan politik), dan administrative operability (kemampuan operasional administratif). Penggunaan kerangka Bardach memungkinkan proses pemilihan kebijakan dilakukan secara sistematis dan objektif sehingga menghasilkan rekomendasi yang tidak hanya efektif dalam menyelesaikan masalah, tetapi juga realistis untuk diterapkan dalam konteks pemerintahan daerah Kabupaten Sikka.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif berbasis dokumen untuk menganalisis strategi percepatan penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kabupaten Sikka melalui penguatan tata kelola data berbasis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Metode ini dipilih untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai permasalahan, faktor penyebab, serta alternatif kebijakan yang dapat diterapkan dalam meningkatkan efektivitas intervensi pemerintah daerah pada sektor perumahan. Data penelitian diperoleh melalui telaah berbagai dokumen perencanaan, regulasi, laporan kinerja perangkat daerah, dokumen evaluasi program, serta referensi ilmiah yang berkaitan dengan tata kelola perumahan, penanggulangan kemiskinan, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Satu Data Indonesia, dan DTSEN. Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui identifikasi isu strategis, analisis rantai penyebab (causal chain analysis), serta evaluasi alternatif kebijakan menggunakan kerangka analisis kebijakan Eugene Bardach (2012) berdasarkan kriteria technical

feasibility, economic and financial possibility, political viability, dan administrative operability. Melalui pendekatan ini, penelitian berupaya menghasilkan rekomendasi kebijakan yang mampu meningkatkan akurasi data hunian, memperkuat koordinasi lintas sektor, meminimalkan kesalahan sasaran penerima bantuan, serta mendukung implementasi tata kelola pemerintahan berbasis data (data-driven governance) dalam percepatan penanganan RTLH dan pengentasan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Sikka.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Alternatif Kebijakan Penanganan RTLH

Berdasarkan hasil identifikasi akar masalah, dirumuskan tiga alternatif kebijakan yang dapat diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Sikka. Alternatif pertama adalah pembangunan Sistem Informasi Terintegrasi “Satu Data RTLH Sikka” yang berfungsi sebagai pusat pengelolaan data perumahan daerah. Alternatif kedua adalah transformasi mekanisme intervensi berbasis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) melalui pemanfaatan basis data nasional sebagai acuan utama dalam penetapan sasaran penerima bantuan. Alternatif ketiga adalah penguatan tata kelola data melalui penyusunan regulasi operasional daerah serta sertifikasi verifikator lapangan untuk meningkatkan kualitas proses verifikasi dan validasi data.

Alternatif pertama memiliki keunggulan dalam membangun fondasi tata kelola data jangka panjang yang terintegrasi. Namun demikian, implementasinya membutuhkan investasi teknologi yang relatif besar serta kesiapan sumber daya manusia yang memadai. Alternatif kedua menawarkan kemudahan implementasi karena memanfaatkan infrastruktur data nasional yang telah tersedia, sehingga lebih efisien dari sisi biaya dan waktu pelaksanaan. Sementara itu, alternatif ketiga berfokus pada penguatan aspek kelembagaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia guna menjamin akurasi data yang dihasilkan di tingkat lapangan.

Evaluasi Alternatif Kebijakan Menggunakan Metode Bardach

Evaluasi terhadap ketiga alternatif kebijakan dilakukan menggunakan kerangka analisis Eugene Bardach (2012) dengan mempertimbangkan empat kriteria utama, yaitu technical feasibility, economic and financial possibility, political viability, dan administrative operability. Hasil penilaian menunjukkan bahwa alternatif transformasi mekanisme intervensi berbasis DTSEN memperoleh nilai tertinggi dibandingkan alternatif lainnya.

Dari aspek kelayakan teknis, pemanfaatan DTSEN dinilai lebih siap untuk diimplementasikan karena didukung oleh sistem dan basis data nasional yang telah berjalan. Dari aspek ekonomi dan keuangan, alternatif ini relatif lebih efisien karena tidak memerlukan investasi teknologi yang besar pada tahap awal. Dari aspek politik, penggunaan DTSEN memiliki tingkat keberterimaan yang tinggi karena selaras dengan arah kebijakan nasional terkait percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dan transformasi tata kelola data pemerintah. Selain itu, dari aspek operasional administratif, implementasi DTSEN dinilai lebih mudah dilakukan karena dapat memanfaatkan struktur kelembagaan dan mekanisme verifikasi yang telah tersedia di tingkat daerah.

Hasil evaluasi tersebut menunjukkan bahwa transformasi mekanisme intervensi berbasis DTSEN merupakan alternatif kebijakan yang paling realistis dan efektif untuk diterapkan dalam jangka pendek sebagai upaya mempercepat penanganan RTLH di Kabupaten Sikka. Pemanfaatan DTSEN memungkinkan pemerintah daerah memperoleh data yang lebih akurat, mutakhir, dan terintegrasi sehingga meningkatkan ketepatan sasaran program bantuan perumahan.

Strategi Konvergensi Bertahap dan Penguatan Regulasi Daerah

Meskipun transformasi intervensi berbasis DTSEN menjadi alternatif kebijakan terbaik, keberlanjutan program memerlukan strategi implementasi yang terencana dan terintegrasi. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan penerapan Strategi Konvergensi Bertahap (Phased Convergence Strategy) yang menggabungkan keunggulan DTSEN dengan pengembangan sistem informasi daerah secara berkelanjutan. Pada tahap awal, dilakukan proses cleansing dan matching data RTLH dengan basis data DTSEN untuk memastikan kesesuaian identitas dan kondisi sosial ekonomi calon penerima bantuan. Tahap berikutnya diarahkan pada pembangunan platform digital “Satu Data RTLH Sikka” sebagai pusat integrasi data sektoral yang dapat digunakan oleh seluruh perangkat daerah terkait.

Keberhasilan strategi tersebut perlu didukung oleh penguatan kerangka regulasi daerah melalui penyusunan Peraturan Bupati Sikka tentang Tata Kelola Data dan Mekanisme Penetapan Sasaran Penerima Bantuan Perumahan Layak Huni. Regulasi ini berfungsi sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan verifikasi, validasi, pemutakhiran data, serta koordinasi lintas sektor. Selain itu, regulasi juga mengatur standar operasional verifikator lapangan dan mekanisme sertifikasi guna menjamin objektivitas serta kualitas data yang dihasilkan.

Dalam implementasinya, pemerintah desa dan kelurahan ditempatkan sebagai ujung tombak verifikasi lapangan berbasis by name by address (BNBA). Kedekatan pemerintah desa dengan masyarakat memungkinkan proses validasi dilakukan secara lebih akurat dan responsif terhadap perubahan kondisi sosial ekonomi warga. Melalui integrasi DTSEN, penguatan regulasi, serta pelibatan aktif pemerintah desa dan kelurahan, diharapkan tata kelola penanganan RTLH di Kabupaten Sikka dapat menjadi lebih efektif, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan dalam mendukung percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kabupaten Sikka masih menghadapi berbagai hambatan yang menyebabkan rendahnya efektivitas intervensi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas hunian masyarakat secara berkelanjutan. Hasil analisis menunjukkan bahwa akar permasalahan utama terletak pada rendahnya kualitas data hunian yang disebabkan oleh belum tersedianya sistem informasi satu data yang terintegrasi. Kondisi tersebut berdampak pada ketidaktepatan sasaran penerima bantuan, lemahnya koordinasi lintas sektor, serta kurang optimalnya pelaksanaan program penanganan RTLH. Melalui analisis kebijakan menggunakan metode Eugene Bardach, penelitian ini menemukan bahwa transformasi mekanisme intervensi berbasis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) merupakan alternatif kebijakan yang paling efektif untuk diterapkan karena memiliki tingkat kelayakan teknis, ekonomi, politik, dan operasional yang lebih tinggi dibandingkan alternatif lainnya. Penerapan Strategi Konvergensi Bertahap (Phased Convergence Strategy) melalui proses cleansing dan matching data berbasis DTSEN yang selanjutnya diintegrasikan ke dalam platform “Satu Data RTLH Sikka” diyakini mampu meningkatkan akurasi penargetan program, meminimalkan risiko inclusion error dan exclusion error, serta memperkuat implementasi tata kelola pemerintahan berbasis data (data-driven governance) dalam percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Sikka.

Berdasarkan temuan tersebut, Pemerintah Kabupaten Sikka perlu menjadikan DTSEN sebagai basis utama dalam proses perencanaan, verifikasi, dan penetapan sasaran penerima bantuan RTLH, sekaligus mengembangkan sistem informasi terintegrasi “Satu Data RTLH Sikka” sebagai instrumen pengelolaan data perumahan yang berkelanjutan. Penguatan regulasi melalui penyusunan Peraturan Bupati tentang Tata Kelola Data dan Mekanisme Penetapan Sasaran Penerima Bantuan Perumahan Layak Huni menjadi langkah strategis untuk menjamin kepastian hukum, standardisasi data, dan koordinasi lintas sektor. Selain itu, pelibatan aktif pemerintah desa

dan kelurahan sebagai ujung tombak verifikasi lapangan berbasis by name by address (BNBA), yang didukung oleh peningkatan kapasitas serta sertifikasi verifikator lapangan, perlu terus diperkuat guna menghasilkan data yang akurat dan akuntabel. Dengan dukungan tata kelola data yang terintegrasi, regulasi yang kuat, dan kolaborasi multipihak yang efektif, upaya penanganan RTLH di Kabupaten Sikka diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mempercepat pengurangan kemiskinan ekstrem, serta mewujudkan pembangunan perumahan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

DAFTAR REFERENSI

- Bardach, E. (2012). *A practical guide for policy analysis: The eightfold path to more effective problem solving* (4th ed.). CQ Press.
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
- Kabupaten Sikka. (2020). *Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Kabupaten Sikka Tahun 2020-2040*. Pemerintah Kabupaten Sikka..
- Kabupaten Sikka. (2021). *Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sikka*. Pemerintah Kabupaten Sikka.
- Kabupaten Sikka. (2023). *Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sikka Tahun 2023*. Dinas PKPP Kabupaten Sikka.
- Kabupaten Sikka. (2023). *Laporan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sikka Tahun 2023*. Dinas PKPP Kabupaten Sikka.
- Kabupaten Sikka. (2023). *Laporan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sikka Tahun 2023*. Bapelitbang Kabupaten Sikka
- Kabupaten Sikka. (2023). *Masterplan e-Government / Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Sikka Tahun 2023*. Pemerintah Kabupaten Sikka
- Kabupaten Sikka. (2023). *Notulensi Rapat Koordinasi Lintas Sektor Bapelitbang Kabupaten Sikka Tahun 2023*. Bapelitbang Kabupaten Sikka.

Kabupaten Sikka. (2023). Standar Operasional Prosedur (SOP) Penilaian Kelayakan Perumahan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sikka Tahun 2023. Dinas PKPP Kabupaten Sikka.

Kabupaten Sikka. (2024). Notulensi Rapat Koordinasi Lintas Sektor Bapelitbang Kabupaten Sikka Tahun 2024. Bapelitbang Kabupaten Sikka.

Kabupaten Sikka. (2025). Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sikka Tahun 2025-2029. Pemerintah Kabupaten Sikka.

Kabupaten Sikka. (2025). Peraturan Bupati Sikka Nomor 20 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sikka Tahun 2025-2029. Pemerintah Kabupaten Sikka.

Kabupaten Sikka. (2026). Rancangan Peraturan Bupati Sikka tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Bantuan Rumah TERKASIH (Terima Kunci Siap Huni) Tahun 2026. Pemerintah Kabupaten Sikka.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (2022). Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan dan Penyediaan Rumah Khusus. Kementerian PUPR RI.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2025). Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pedoman Berbagipakai Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional. Kementerian PPN/Bappenas RI.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.